



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

T A H U N 2 0 2 6

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

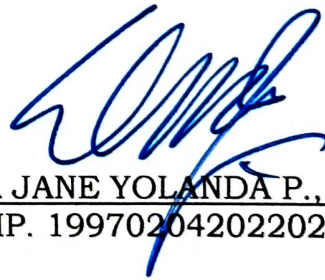
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam,
dan Infrastruktur,



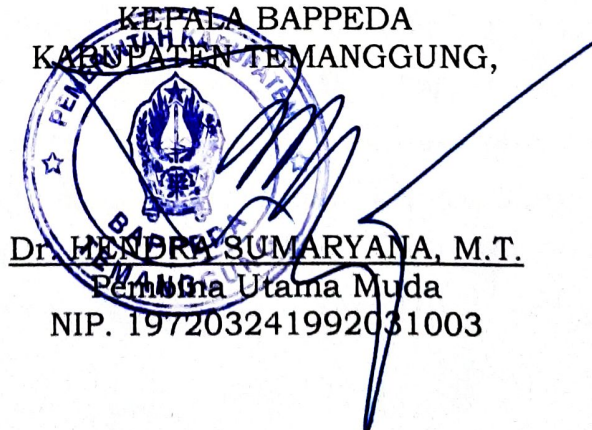
ADI WIBOWO, S.T.
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator,



ELMA JANE YOLANDA P., S.P.W.K.
NIP. 199702042022022001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pemula Utama Muda
NIP. 197203241992031003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2026.

Penyusunan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan, serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan pembangunan, evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, dan masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Renja ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang responsif, adaptif, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Melalui Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026, DPRKPLH Kabupaten Temanggung bertekad untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan dokumen Renja ini dalam rangka mendukung Tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

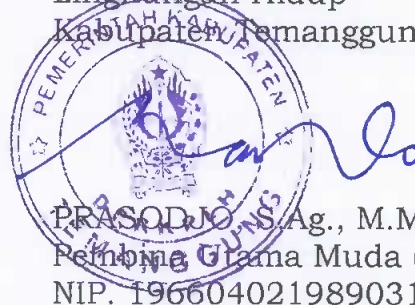
Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, data, dan masukan konstruktif dalam proses penyusunannya mulai dari jajaran pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, staf teknis, hingga para mitra kerja dan masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Semoga dengan kerja keras, komitmen, dan sinergi bersama, kita mampu mewujudkan cita-cita pembangunan menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung secara berkelanjutan.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab.

Temanggung, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029...	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	39
2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	111
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	128
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	128
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	135
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	140
4.1 Program dan Kegiatan	140
BAB V PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Sampai dengan Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Temanggung	40
Tabel 2.4	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung	56
Tabel 2.5	Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dari Tahun 2020-2025.....	57
Tabel 2.6	Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	60
Tabel 2.7	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	62
Tabel 2.8	Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni.....	63
Tabel 2.9	Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2020-2025.....	64
Tabel 2.10	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	66
Tabel 2.11	Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2020-2025	67
Tabel 2.12	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	69
Tabel 2.13	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.....	70
Tabel 2.14	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.....	72

Tabel 2.15	Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan	51
Tabel 2.16	Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025..	75
Tabel 2.17	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	78
Tabel 2.18	Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	80
Tabel 2.19	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	82
Tabel 2.20	Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung.	84
Tabel 2.21	Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2020-2025.....	85
Tabel 2.22	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2020-2025.....	87
Tabel 2.23	Persentase Usaha yang Memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3.....	89
Tabel 2.24	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.....	90
Tabel 2.25	Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung.....	93
Tabel 2.26	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2025.....	94
Tabel 2.27	Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2020-2025.....	96
Tabel 2.28	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	101

Tabel 2.29	Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2020-2025.....	102
Tabel 2.30	Daftar Depo Transfer Tahun 2025.....	103
Tabel 2.31	Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung.....	104
Tabel 2.32	Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan Kabupaten Temanggung.....	105
Tabel 2.33	Daftar Alat Pengolah Sampah di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung.....	106
Tabel. 2.34	Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis.....	110
Tabel 2.35	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.....	113
Tabel 2.36	Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
Tabel 2.37	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2025.....	125
Tabel 2.38	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025.....	126
Tabel 3.1	Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.....	134
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	136
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	141
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	145

- **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

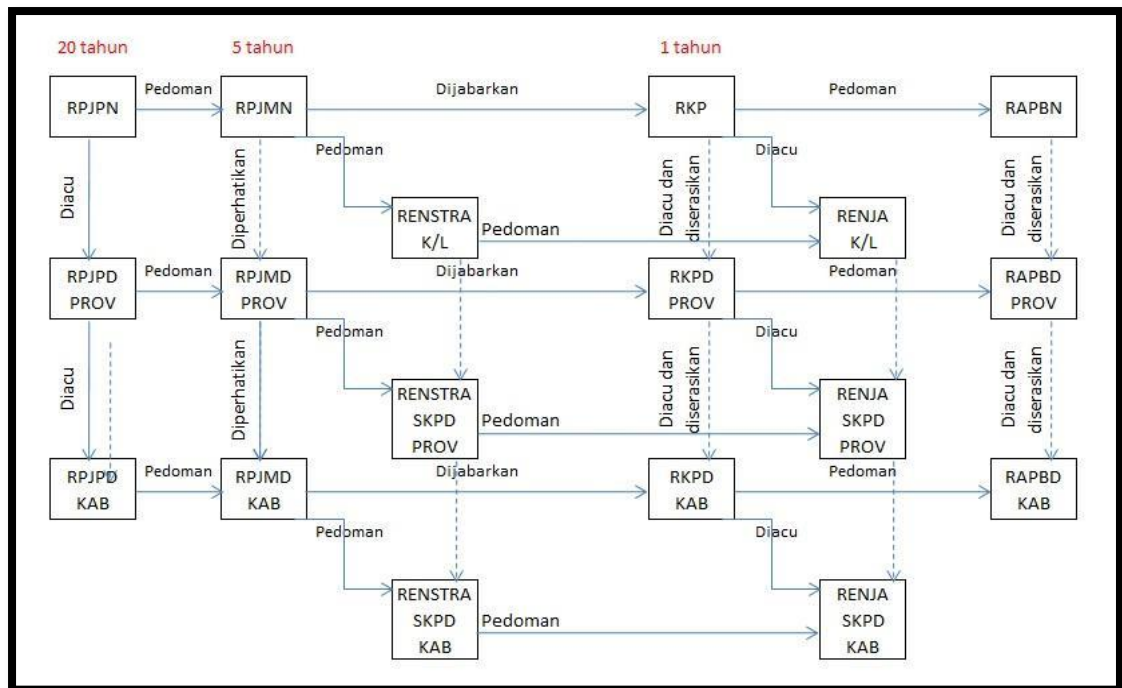
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja DPRKPLH Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPRKPLH Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPRKPLH, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPRKPLH, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPRKPLH;
- 2) Kondisi pelayanan DPRKPLH;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH;
- 4) Data Pokok Pembangunan DPRKPLH;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPRKPLH;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan DPRKPLH.

b. Analisis gambaran pelayanan DPRKPLH;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPRKPLH adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPRKPLH.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPRKPLH untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPRKPLH.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun lalu berdasarkan Renstra DPRKPLH;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPRKPLH. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPRKPLH dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPRKPLH tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra DPRKPLH;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra DPRKPLH;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun sebelumnya, serta

capaian kinerja Renstra DPRKPLH.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPRKPLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPRKPLH;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRKPLH;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPRKPLH;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPRKPLH.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPRKPLH.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPRKPLH;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPRKPLH merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH;

Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPRKPLH dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPRKPLH dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPRKPLH yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPRKPLH untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DPRKPLH Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPRKPLH Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2024 terhadap capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025**. Evaluasi terhadap capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Sampai dengan Tahun 2024

Indikator Sasaran RPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat daerah :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD) :

1. Persentase Perumahan dan Permukiman layak huni

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.000.000.000	10.469.879.000	-	10.469.518.341	-	100	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100			100		100		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000.000	10.469.879.000		10.469.518.341		100	
	-	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	1.006	5.000.000.000	10.469.879.000	1012	10.469.518.341	100	100	Terdapat pengembangan karena sebagian yang menerima bantuan sudah memiliki bilik sehingga alokasi anggaran untuk pembuatan bilik dialihkan ke penerima bantuan yang lain
			Terlaksananya Pembangunan Tangki Septic Individu	%	100			100		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.201.800.000	1.010.076.140		946.483.302		93,70	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,46			3,69		100		
			Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	88,30			95,29		100		
	a.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.201.800.000	1.010.076.140		946.483.302		93,70	
	-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	72	1.201.800.000	1.010.076.140	72	946.483.302	100	93,70	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7.385.738.800	8.032.124.790		7.867.280.889		97,95	
			Persentase Rumah Layak Huni	%	95,54			96,31		100		
			Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,84			3,63		100		
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100			100		100		
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100			100		100		
	a.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				7.385.738.800	8.032.124.790		7.867.280.889		97,95	
	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	308	7.385.738.800	8.032.124.790	308	7.867.280.889	100	97,95	Terdapat anggaran untuk pembangunan sebanyak 7 RTLH yang dikembalikan yang disebabkan: 1. Pengunduran diri dari penerima karena

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
												a. Penerima bantuan belum memiliki legalitas tanah b. Penerima bantuan status tanahnya dalam sengketa keluarga c. Penerima bantuan tidak siap swadaya 2. Penerima bantuan sudah mendapat bantuan pembangunan RTLH dari sumber lain
			Jumlah Jamban yang dibangun	Unit	30			30		100		Desa Samiran Kecamatan Kandangan
			Jumlah rumah yang diplester lantai	Unit	44			44		100		Desa Sungginsari Kecamatan Parakan dan Desa Kebonsari Kecamatan Wonobojo
			Jumlah rumah yang dipasang listrik	Paket	125			125		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										
			Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100			100		100		
	5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				200.000.000	200.000.000		197.449.700		98,72	
			Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100			100		100		
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100			100		100		
	a.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000	50.000.000		47.789.550		95,58	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	-	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	50.000.000	1	47.789.550	100	95,58	
	b.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				150.000.000	150.000.000		149.660.150		99,77	
	-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	150.000.000	150.000.000	1	149.660.150	100	99,77	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (4) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				799.999.950	452.954.550		409.445.966		90,39	
			Indeks Kualitas Air		52,70			59,63		100		
			Indeks Kualitas Udara		83,82			87,84		100		
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,067			3,09		100		
	a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				399.999.950	252.955.150		243.940.193		96,44	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	50.000.000	30.000.000	1	29.553.500	100	98,51	
	-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan	Dokumen	25	349.999.950	222.955.150	25	214.386.693	100	96,16	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Dokumen Mutu yang Dilaksanakan									
	b.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				400.000.000	199.999.400		165.505.773		82,75	
	-	Pelaksanaan rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1	400.000.000	199.999.400	64,65	165.505.773	100	82,75	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.300.000.000	1.387.500.000		1.336.637.497		96,33	
			Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	63,90			92,02		100		
	a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.300.000.000	1.387.500.000		1.336.637.497		96,33	
	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	7,96	1.200.000.000	1.287.500.000	7,96	1.238.046.232	100	96,16	
			Terpeliharanya Taman Kota	Bulan	12			12		100		
	-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	100.000.000	100.000.000	1	98.591.265	100	98,59	
			Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda	Bulan	12	90.864.000		12		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis	%	100			100		100		

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengelolaan Limbah B3									
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				50.000.000	35.738.800		31.575.583		88,35	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100			100		100	88,35	
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	35.738.800		31.575.583		88,35	
	-	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	50	50.000.000	35.738.800	50	31.575.583	100	88,35	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN										

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,60			28,93		100		
	11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				50.000.000	50.000.000		49.527.584		99,06	
			Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100			100		100		
	a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	50.000.000		49.527.584		99,06	
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	50.000.000	50.000.000	1	49.527.584	100	99,06	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100			100		100		
	13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				12.085.000.000	9.127.499.700		7.520.958.149		82,40	
			Persentase sampah yang tertangani	%	60,21			62,91		100		
			Cakupan layanan persampahan	%	64,71			74,39		100		

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	a.	Pengelolaan Sampah				12.085.000.000	9.127.499.700		7.520.958.149		82,40	
	-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	198	400.000.000	400.000.000	215	307.126.444	100	76,78	
	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhri	Unit	5	5.000.000.000	2.912.499.700	5	1.514.071.383	100	51,99	
			Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bulan	12			12		100		
	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	90.279	6.685.000.000	5.815.000.000	93.204,56	5.699.760.322	100	98,02	
			Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bulan	12			12		100		
			Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bulan	12			12		100		
			Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan	Bulan	12			12		100		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
				K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Prasarana dan Sarana Persampahan									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)									100		
Predikat									Sangat Tinggi		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.973.835.806	12.757.561.989		12.513.598.866		98,09	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100			100		100		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.099.413.456	11.845.144.939		11.669.704.195		98,52	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1599	12.099.413.456	11.845.144.939	1.599	11.669.704.195	100	98,52	
			Orang	123							
			Bulan	13							
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah				110.996.250	106.993.150		93.446.830		87,34	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.999.750	8.997.000	12	8.596.230	100	95,55	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.000.000	22.000.000	12	19.387.000	100	88,12	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	20.000.000	12	19.928.100	100	99,64	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	25.997.500	25.997.150	12	21.849.600	100	84,05	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	29.999.000	29.999.000	12	23.685.900	100	78,96	
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				617.000.000	626.999.700		586.118.311		93,48	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	2.000.000	12	1.294.000	100	64,70	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	110.000.000	12	87.523.252	100	79,57	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Laporan	12	525.000.000	514.999.700	12	497.301.059	100	96,56	
	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.426.100	178.424.200		164.329.530		92,10	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	78.000.000	100.000.000	24	86.901.800	100	86,90	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	60.426.100	65.424.200	1,00	64.551.730	100	98,67	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	8.000.000	13.000.000	13	12.876.000	100	99,05	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (10) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
						RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH				100	94,99	
						PREDIKAT				Sangat Tinggi		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
				K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		100		
							PREDIKAT		Sangat Tinggi		
	JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN				41.046.374.556	43.523.334.969		41.342.475.877			
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang menjadi kendala maupun hambatan dapat diselesaikan sejak awal							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:		1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain							
	Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut	:		Perencanaan secara optimal pada pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang berorientasi pada hasil							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/ Kota berikutnya	:		Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2025 mendatang dengan mengacu dan berkesinambungan dengan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026							

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
s.d Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran RPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat daerah :
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD) :
 1 Persentase Perumahan dan Permukiman layak huni
 2 Indeks Kualitas Air (IKA)
 3 Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.536.400.000		-		-		0	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				-	2.536.400.000		-		-		0	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS yang dibangun	Ton/ Hari	2		2.536.400.000	0		0	-	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)											0		
Predikat											Sangat Rendah		
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				10.419.879.000	6.655.398.000		5.953.000		5.953.000		0	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100			100		100		100		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.419.879.000	6.655.398.000		5.953.000		-		0	

No	-	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	
								K	Rp.					
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	517	10.419.879.000	6.655.398.000	0	5.953.000	0		0	0	
			Terlaksananya Pembangunan Tangki Septic Individu	%	100			0		0		0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)												0		
Predikat												Sangat Rendah		
3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				316.091.000	316.091.000		45.711.991		45.711.991		14,46	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,11			3,69		3,69		100		
			Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	88,40			95,29		95,29		100		
	a	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				316.091.000	316.091.000		45.711.991		45.711.991		14,46	
	-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	72	316.091.000	316.091.000	18	45.711.991	18	45.711.991	25,00	14,46	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)												25,00		
Predikat												Sedang		
4		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.113.909.000	1.209.000.000		-		-		0,00	
			Persentase Rumah Layak Huni	%	95,89			96,31		96,31		100		
			Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,82			3,63		3,63		100		
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100			100		100		100		
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program	%	100			100		100		100		

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni											
	a	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				6.113.909.000	1.209.000.000		-		-		0,00	
	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	57	6.113.909.000	1.209.000.000		-	0	-	0	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (4) (%)												0		
Predikat												Sangat Rendah		
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
			Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100			100		100		100		
	5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000	50.000.000	0	1.298.500		1.298.500		2,60	
			Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100			0		0		0		
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100			100		100		100		
	a	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000	50.000.000		1.298.500		1.298.500		2,60	

No	-	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	50.000.000	0,30	1.298.500	0	1.298.500	30,00	2,60	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)												30,00		
Predikat												Tinggi		
	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				250.000.000	345.000.000		850.000		850.000		0,25	
			Indeks Kualitas Air		53,30			59,63		59,63		100		
			Indeks Kualitas Udara		83,87			87,84		87,84		100		
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,067			3,27		3,27		100		
	a	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				115.000.000	330.000.000		-		-		0,00	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	25.000.000	30.000.000	0		0	-	0	0	
	-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	25	90.000.000	300.000.000	2	-	2	-	8,00	0	
	b	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				135.000.000	15.000.000		850.000		850.000		5,67	
	-	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota	Ha	1	135.000.000	15.000.000	16,70	850.000	16,70	850.000	100	5,67	

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			yang menjadi kewenangan kabupaten/kota											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)												36,00		
Predikat												Tinggi		
	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				375.000.000	175.000.000		23.964.600		23.964.600		13,69	
			Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	65,00			73,61		73,61		100		
	a	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				375.000.000	175.000.000		23.964.600		23.964.600		13,69	
	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5,76	375.000.000	175.000.000	5,76	23.964.600	5,76	23.964.600	100	13,69	
			Terpeliharanya Taman Kota	Bulan	12			3		3		25,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)												62,50		
Predikat												Sangat Tinggi		
	8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100			100		100		100		
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				10.000.000	10.000.000		575.000		575.000		5,75	
			Persentase Pembinaan dan	%	100			20,00		20		20,00	5,75	

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup											
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	10.000.000		575.000		575.000		5,75	
	-	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	50	10.000.000	10.000.000	10	575.000	10	575.000	20,00	5,75	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%)												20,00		
Predikat												Rendah		
	10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,60			28,93		28,93		100		
	11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				70.000.000	25.000.000		1.210.500		1.210.500		4,84	
			Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100			0		0		0		

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	a .	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000	25.000.000		1.210.500		1.210.500		4,84	
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	70.000.000	25.000.000	0	1.210.500	0	1.210.500	0	4,84	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)												0		
Predikat												Sangat Rendah		
	1 2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100			100		100		100		
	1 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				3.500.000.000	6.000.000.000		513.144.377		513.144.377		8,55	
			Persentase sampah yang tertangani	%	60,50			60,75		60,75		100		
			Cakupan layanan persampahan	%	66,44			76,12		76,12		100		
	a .	Pengelolaan Sampah				3.500.000.000	6.000.000.000		513.144.377		513.144.377		8,55	
	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	Unit	5	1.600.000.000	4.100.000.000	5	94.497.900	5	94.497.900	100	2,30	

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhi											
			Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bula n	12			3		3		25,00		
	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	91.485	1.900.000.000	1.900.000.000	22.496	418.646.477	22.495,58	418.646.477	24,59	22,03	
			Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bula n	12			3		3		25,00		
			Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bula n	12			3		3		25,00		
			Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Bula n	12			3		3		25,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (10) (%)												37,43		
Predikat												Tinggi		
	14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.252.379.584	18.765.078.131		4.958.942.666		4.958.942.666		26,43	

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan	
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	I							
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA													
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100			100		0		0			
	a .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.436.291.184	12.948.989.731		3.201.080.741		3.201.080.741		24,72		
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/ Bula n	161 2	12.436.291.184	12.948.989.731	372	3.201.080.741	372	3.201.080.741	23,08	24,72	
			Oran g	124										
			Bula n	13										
	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah			112.998.500	112.998.500		5.569.297		5.569.297		4,93		
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6.000.000	6.000.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.000.000	22.000.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	20.000.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	12	25.000.000	25.000.000	3	2.467.500	3	2.467.500	25,00	9,87	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	12	39.998.500	39.998.500	3	3.101.797	3	3.101.797	25,00	7,75	
	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				41.000.000	41.000.000		-	0	-	0	0,00	

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan	
							I							
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Urusan Pemerintah Daerah												
	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	16.000.000	16.000.000		-	0	-	0	0,00	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	25.000.000	25.000.000		-	0	-	0	0,00	
	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.482.090.700	5.482.090.700		1.741.851.128		1.741.851.128		31,77	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an	12	2.000.000	2.000.000	3	390.000	3	390.000	25	19,50	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	105.000.000	105.000.000	3	22.390.964	3	22.390.964	25	21,32	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Lapor an	12	5.375.090.700	Rp5.375.090.700	3	1.719.070.164	3	1.719.070.164	25	31,98	
	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				179.999.200	179.999.200		10.441.500		10.441.500		5,80	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	100.000.000	100.000.000	6	5.946.500	6	5.946.500	25,00	5,95	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	69.999.200	69.999.200	0,25	2.145.000	0,25	2.145.000	25,00	3,06	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	12	10.000.000	10.000.000	4	2.350.000	4	2.350.000	33,33	23,50	

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
							I						
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Dipelihara/Direha bilitasi											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (11) (%)											20,43		
Predikat											Rendah		
						RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH					21,03	15,38	
						PREDIKAT					Rendah		
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH					82,73		
						PREDIKAT					Sangat Tinggi		
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN					39.357.258.584	36.086.967.131		5.551.650.634		5.551.650.634			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				:	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang menjadi kendala maupun hambatan dapat diselesaikan sejak awal								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				:	1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain 3. Sistem pembayaran dengan KKPD belum dapat dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 4. Pencairan termin I untuk pelaksanaan kegiatan fisik DAK Tahun 2025 pada triwulan I belum dapat dilaksanakan								
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut				:	Akselerasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan II dengan tetap memperhatikan timeline perencanaan								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/ Kota berikutnya				:	Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2025 serta mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Kepala Daerah agar dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan								

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan rincian indikator sebagai berikut:
 - Persentase perumahan dan Permukiman layak huni
 - Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
 - Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
 - Persentase rumah layak huni
 - Persentase kawasan kumuh perkotaan
 - Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
 - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)
 - Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)
 - Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan

- Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
 - Indeks Kualitas Air
 - Indeks Kualitas Udara
 - Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis
 - Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani
 - Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3
 - Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
 - Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan
 - Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup
 - Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
 - Persentase sampah yang tertangani
 - Cakupan Pelayanan persampahan
4. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota
5. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Pelaksanaan rehabilitasi
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
 6. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran : Nihil
 7. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program : Nihil
 8. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan : Nihil

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **“Memuaskan”** yaitu dengan nilai **100%** apabila dengan menggunakan pembanding target tahun 2024. Hal tersebut didukung dengan

data capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian Kinerja 100 % (Kategori Memuaskan).

Apabila pembandingan dengan menggunakan target akhir RPD Tahun 2024-2026 capaian kinerja dengan kategori **“Memuaskan”** dengan nilai **99,30%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 99,30% (Kategori Memuaskan).

Dari Tabel 2.1. dan 2.2 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW I 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
INDIKATOR SASARAN															
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,83	65,41	65,66	65,87	68,25	68,25		100	V				
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)															
1	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,12	99,02	99,03	99,03	99,34	99,34		100	V				
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	64,07	52,70	53,30	53,80	59,63	59,63		100	V				
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,10	83,82	83,87	83,92	87,84	87,84		100	V				
INDIKATOR PROGRAM															
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,50	4,46	4,11	3,75	3,69	3,69		100	V				
2	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	94,39	88,30	88,40	88,50	95,29	95,29		100	V				
3	Persentase rumah layak huni	%	94,5	95,54	95,89	96,25	96,31	96,31		100	V				
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,86	4,84	4,82	4,8	3,63	3,63		100	V				
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100		100	V				

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW I 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
8	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
9	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	0		0					V
10	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
11	Indeks Kualitas Air	Angka	64,07	52,70	53,30	53,80	59,63	59,63		100	V				
12	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,10	83,82	83,87	83,92	87,84	87,84		100	V				
13	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	2,46	0,067	0,067	0,067	3,09	3,27		100	V				
14	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	n.a	63,90	65,00	70	92,02	73,61		100	V				
15	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
16	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	20,00		20,00					V
17	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,87	28,6	30	31,3	28,93	28,93		96,44	V				
18	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	166,67	0		0					V
19	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
20	Persentase sampah yang tertangani	%	61,26	60,21	60,50	61,00	62,91	60,75		100	V				
21	Cakupan Pelayanan persampahan	%	68,51	64,71	66,44	68,17	74,39	76,12		100	V				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR SASARAN

Terdapat 1 Indikator Sasaran dengan status capaian Sangat Tinggi yaitu:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Faktor pendorong : Sinergitas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara

Faktor penghambat : Dari hasil pengujian terdapat kualitas air sungai yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan di beberapa titik pemantauan dan Kualitas udara yang masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan status capaian Sangat Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Faktor pendorong : Pembangunan RTLH menjadi RLH dengan sumber dana APBD dan Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program DAK Sanitasi

Faktor penghambat : Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi, kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan perencanaan awal

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan kualitas air yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan yang kualitas udaranya masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD

3. INDIKATOR PROGRAM

A. Capaian program dengan status capaian Sangat Tinggi terdapat sebanyak 18 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Faktor pendorong : Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

- Sumber APBD Kabupaten Temanggung sejumlah 57 Unit
 - Sumber APBD Provinsi Jawa Tengah melalui BankeuPemdes sejumlah 584 unit
- Faktor penghambat : Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi, kuantitas/ jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data
- Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH layak huni

b. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi

- Faktor pendorong : Potensi Pembangunan Tahun 2025 dalam bidang sanitasi dengan sumber dana DAK Sanitasi Tahun 2025 sejumlah 517 Unit di 13 Desa
- Faktor penghambat : Kuantitas atau jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data
- Rekomendasi dan tindaklanjut : Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung

c. Persentase Rumah Layak Huni

Faktor pendorong : Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

- Sumber APBD Kabupaten Temanggung sejumlah 57 Unit
- Sumber APBD Provinsi Jawa Tengah melalui BankeuPemdes sejumlah 584 unit

Faktor penghambat : Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi, kuantitas/ jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH layak huni

d. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Faktor pendorong : Melalui kegiatan perbaikan RTLH dan pembangunan infrastruktur sanitasi

Faktor penghambat : Terbatasnya Anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman

Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan

e. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)

Faktor pendorong : Penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana

Faktor : Belum adanya pos anggaran pada penghambat DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban apabila terjadinya bencana

Rekomendasi dan : Identifikasi mitigasi bencana dan tindaklanjut menyiapkan lahan relokasi

f. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Faktor pendorong : Usulan program RUSPIN kepada pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Faktor : warga calon penerima harus memiliki penghambat tanah tersedia untuk relokasi dan Kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah

Rekomendasi dan : Meningkatkan sinergitas dengan tindaklanjut Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

g. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)

Faktor pendorong : Penanganan ODF di Kabupaten Temanggung

Faktor : Masih banyaknya jamban belum penghambat berseptitank

Rekomendasi dan : - Mempersiapkan prasarana dan sarana tindaklanjut lebih lengkap lagi
- Program jamban keluarga

h. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan

Faktor pendorong : Adanya koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian fasilitasi pertanahan

Faktor penghambat : - Ketidaksesuaian peruntukkan tanah
 Surat administrasi tanah tidak lengkap
 Rekomendasi dan tindaklanjut : Rapat koordinasi dan mediasi dengan pihak terkait

i. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Diterbitkan :
 - Persetujuan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung
 - PKPLH Kegiatan Perbaikan Dinding Penahan Tebing (DPT) dan Groundsill Sungai Galeh Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
 - Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kedu

Faktor penghambat : Adanya aplikasi baru berupa sistem Amdalnet yang masih dalam proses pengintegrasian dan penerapan aplikasi terhadap sistem OSS menjadi faktor penghambat dalam pelayanan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Melakukan koordinasi dengan KLHK dan DPMPTSP

j. Indeks Kualitas Air (IKA)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan kualitas air yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

k. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan yang kualitas udaranya masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD

1. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung

Faktor pendorong : - Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan upaya penanganan lahan kritis seluas 334.41 Ha
- Adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, KLHK, OPD terkait, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat dan organisasi relawan yang berpartisipasi dalam Gerakan Penanaman³. Musim hujan yang datang lebih awal sehingga memungkinkan dilakukannya penanaman lebih awal

Faktor penghambat : Diperlukan dana/anggaran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan penanganan lahan kritis serta penyesuaian jadwal penanaman yang tepat.

Rekomendasi dan tindaklanjut : - Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintahan, maupun masyarakat umum
- Identifikasi masalah untuk penentuan tematik penanaman
- Melakukan inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya
- Melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya5. Perawatan bibit yang lebih intensif, sehingga bibit siap didistribusikan ketika dibutuhkan oleh masyarakat

m. Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani

Faktor pendorong : Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin

Faktor penghambat : Luasan RTH milik pemerintah daerah pada tahun 2024 bertambah menjadi 108.550,21 m2. Penambahan RTH diantaranya Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan dan Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Pemeliharaan rutin tahun ini tidak dapat dilaksanakan maksimal hal ini disebabkan karena :

- Kurangnya sarana prasarana dalam pemeliharaan RTH
- Jumlah SDM yang terbatas
- Hutan kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya

Rekomendasi dan : Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada tindaklanjut

n. Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Faktor pendorong : Adanya regulasi yang mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis atau standar tempat penyimpanan limbah B3

Faktor penghambat : Kegiatan dan/atau Usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PerMen LHK turunannya

Rekomendasi dan : Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan tindaklanjut untuk membuat rincian teknis atau standar teknis penyimpanan limbah B3

o. Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Faktor pendorong : Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah

	Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan
Faktor penghambat	: Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata
Rekomendasi dan tindaklanjut	: 1. Mendorong dan memaksimalkan potensi sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata 2. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

p. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Faktor pendorong	: Adanya sinergitas antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung
Faktor penghambat	: Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
Rekomendasi dan tindaklanjut	: Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup

q. Persentase Sampah yang Tertangani

Faktor pendorong : Terdapat penambahan cakupan pelayanan, Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa

Faktor penghambat : Belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah dan terdata, belum optimalnya pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah (TPS3R, TPSD, bank Sampah), Budaya buang sampah sembarang masih ada di masyarakat

Rekomendasi dan tindaklanjut : Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat desa serta koordinasi dan pendampingan pengelolaan sampah di fasilitas

r. Cakupan Layanan Persampahan

Faktor pendorong : Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa

Faktor penghambat : Belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah, terbatasnya armada dan SDM pengangkut sampah

Rekomendasi dan tindaklanjut : Menghimbau pengelola sampah desa agar melakukan pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri, Koordinasi dengan Pemerintah Desa.

- B. Capaian program dengan status capaian Tinggi : nihil
- C. Capaian program dengan status capaian Sedang : nihil
- D. Capaian program dengan status capaian Rendah : nihil
- E. Capaian program dengan status capaian Sangat Rendah sebanyak 3 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Pada tahun 2025 Kabupaten Temanggung akan menyusun dokumen lingkungan sebanyak 1 dokumen lingkungan hidup yaitu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Saat ini Dokumen IKPLHD Tahun 2025 sedang dalam proses pengumpulan data dan proses penyusunan.

Faktor penghambat : Data pendukung masih belum update

Rekomendasi dan tindaklanjut : Menyusun SK Tim penyusun dokumen

b. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Faktor pendorong :

- Adanya tim Pembinaan dan Peengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi Usaha dan/atau kegiatan di DPRKPLH Kab. Temanggung
- Adanya pengumpulan data secara online untuk pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung"

Faktor penghambat : Belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

Rekomendasi dan tindaklanjut : - Melakukan permintaan data Update terkait pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya pengawasan secara tidak langsung.

- Membuat daftar target prioritas untuk pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

c. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup

Faktor pendorong : Usulan Penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang sudah diajukan pada triwulan I tahun 2025:

- Penghargaan Kalpataru
- Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah

Faktor penghambat : - Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun

- Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun

Rekomendasi dan tindaklanjut : - Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang

2.2.2 Data Pokok

lingkungan hidup lainnya baik tingkat provinsi maupun nasional

- Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup
- Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
- Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
- Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan

Data Pokok pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu:

- a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Bidang Pertanahan
- d. Bidang Lingkungan Hidup

Rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

A. INDIKATOR SASARAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus serta klasifikasi dan rentang Nilai IKLH dapat sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Sangat Baik	90 - 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024
KLHK

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IKLH	65,61	69,51	69,86	74,83	68,25	68,25
1	IKU	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84	87,84
2	IKA	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63	59,63
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	46,81	46,81
Perhitungan Rumus Lama			Perhitungan Rumus Baru				
IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)			IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)				

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Nilai IKLH tahun 2025 apabila di bandingkan dengan tahun 2024 masih sama karena data yang digunakan merupakan data tahun 2024.

B. IKU PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. PERSENTASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
LAYAK HUNI

Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Sebagai landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Rumus indikator kinerja menggunakan 16 indikator kumuh dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikali 100%.

Tabel 2.5
Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman
Layak Huni dari Tahun 2020-2025

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Luas Kawasan Permukiman non Kumuh	13.560,42	13.598,74	13.598,74	13.615,85	13.646,72	13.646,72
Luas Permukiman Wilayah Kabupaten	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26
Persentase (%)	98,71	98,99	98,99	99,12	99,34	99,34

Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni tahun 2025 triwulan I yaitu 99,34%. Realisasi tersebut masih sama dengan tahun 2024 karena sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih dalam proses persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal sehingga target kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni adalah Pembangunan RTLH menjadi RLH dengan sumber dana APBD dan Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program DAK Sanitasi. Sedangkan penghambatnya antara lain

1. Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi,
2. Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

2. INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$: IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

- $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan
- $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang
- $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Tabel 2.6
Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63	59,63

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 nilai IKA masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sebesar 59,63 hal ini disebabkan karena jadwal pengujian kualitas air belum dilaksanakan pada awal tahun 2025. Faktor Pendorong lainnya Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan. Upaya untuk mencapai target antara lain dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

3. INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,

- b. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota:
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- c. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e. Mengacu pada baku mutu EU yaitu $SO_2 = 20 \mu g/m^3$ dan $NO_2 = 40 \mu g/m^3$,
- f. $I_{eu} = 50\% \text{Indeks}NO_2 + 50\% \text{Indeks}SO_2$,
- g. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84	87,84

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai IKU dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024, hal ini disebabkan karena belum ada jadwal pengujian kualitas udara ambien dari Kementerian LHK. Faktor pendorong antara lain dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan.

C. INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sebagai dasar hukumnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus yaitu jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%. Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah RTLH (unit)	17.535	13.125	11.421	9.828	8.098	8.098
2	Jumlah Rumah se-Kabupaten Temanggung (unit)	215.918	216.785	217.652	218.519	219.386	219.386
3	Persentase (%)	8,12	6,05	5,25	4,5	3,69	3,69

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah RTLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2025. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih sama dengan data tahun 2024 hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH belum dimulai pada triwulan I tahun 2025. Pembangunan RTLH menjadi RLH diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten serta CSR. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2025 melalui Program Bankeupemdes 584 unit dan APBD 57 unit rumah.

Upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 diantaranya meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni.

2) CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES SANITASI

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dapat diketahui dengan formulasi perhitungan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikalikan 100%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2020-2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga terlayani sanitasi	181.568	186.290	198.531	254.145	261.907	261.907
2	Jumlah seluruh rumah tangga	196.536	225.325	225.325	269.251	274.845	274.845
3	Persentase (%)	92,38	82,68	88,11	94,39	95,29	95,29

Berdasarkan tabel di atas jumlah rumah tangga bersanitasi layak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 yaitu sejumlah 274.845 rumah tangga atau secara persentase sebesar 95,29% hal ini disebabkan karena pada triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan pembangunan dalam bidang

sanitasi, masih dalam tahap sosialisasi dan pembentukan KSM.

Keberhasilan jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak didukung oleh program nasional 100-0-100. Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen fasilitas sanitasi. Faktor pendorong capaian indikator ini tahun 2025 antara lain adalah DAK Sanitasi 13 desa untuk 517 kepala keluarga.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3) PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama 5 tahun terakhir adalah pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Rumah layak huni merupakan bagian lain atau kebalikan dari rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga angka rumah layak huni diperoleh dari jumlah rumah dikurangi RTLH. Rumus untuk memperoleh persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun

n dikali 100%. Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	177.349	179.150	206.231	208.691	211.288	211.288
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	217.652	218.519	219.386	219.386
3	Persentase (%)	90,24	91,15	94,75	95,50	96,31	96,31

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2024 jumlah rumah layak huni sebanyak 211.288 unit dari 219.386 unit rumah di Kabupaten Temanggung atau secara persentase sebesar 96,31%. Sedangkan kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH belum dimulai pada triwulan I tahun 2024. Pembangunan RTLH menjadi RLH diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten serta CSR. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2025 melalui Program Bankeupemdes 584 unit dan APBD 57 unit rumah. Upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 diantaranya meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait.

4) PERSENTASE KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

Kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang

umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Wilayah di Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi Kawasan Kumuh yang ada sehingga untuk lebih mengintensifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh, Dasar Hukumnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus Luas Kawasan Kumuh dibagi dengan luas Kawasan Perkotaan dikali 100 % ($138,52 \text{ Ha} \div 2.495,69 \text{ Ha} \times 100\%$) = 5,55%. Capaian dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan
Tahun 2020-2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	176,84	138,52	121,41	121,41	90,54	90,54
2	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2495,69	2495,69
3	Persentase (%)	7,09	5,55	4,86	4,86	3,63	3,63

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan realisasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan luasan kawasan kumuh perkotaan mengalami penurunan. Capaian tahun 2025 masih

sama dengan kondisi tahun 2024 karena pada awal tahun 2025 pelaksanaan kegiatan belum dimulai. Faktor penghambat capaian indikator di atas antara lain terbatasnya anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman. Faktor pendorong capaian indikator di atas antara lain melalui kegiatan perbaikan RTLH dan pembangunan infrastruktur sanitasi, sedangkan upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

5) PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana

dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani (unit)	Na	0	0	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena bencana (unit)	Na	0	0	0	0	0
3	Persentase (%)	Na	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun tahun 2021 sampai dengan triwulan I tahun 2025 tidak ada rumah kena bencana yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%. Salah satu faktor penghambat indikator ini adalah belum tersedianya pos anggaran pada DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban bencana. Faktor pendorong terkait capaian indikator ini adalah penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana.

6) PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu

merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Persentase warga negara yang terkena relokasi
akibat program pemerintah daerah yang memperoleh
fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah relokasi yang tertangani (unit)	37	0	0	24	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena relokasi (unit)	27	0	0	24	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2025 dengan capaian 100%. Sebagai upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah diusulkan melalui program RUSPIN yang ada pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah selain itu dengan meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

PUPR, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi sedangkan masih terdapat sebagian warga belum memiliki tanah untuk relokasi rumah. Selain itu kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni merupakan dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau warga negara yang terdampak akibat adanya Program Pemerintah sehingga dapat meminimalkan dampak sosial masyarakat untuk kelancaran Program Pemerintah.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7) PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi

Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n) dibagi Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun (n) dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator tersebut di atas dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n)	Na	Na	Na	811.798	820.736	820.736
2	Jumlah total warga Negara yang harus dilayani di tahun n	Na	Na	Na	811.798	820.736	820.736
3	Persentase (%)	Na	Na	Na	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara persentase capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong dari capaian indikator ini adalah

1. Penanganan ODF di Kabupaten Temanggung
2. Tersedianya Truck Tinja dan IPLT.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

1. Masih menunggu penetapan Perda Retribusi
2. IPLT belum berfungsi optimal
3. Masih banyaknya jamban belum berseptitank

Untuk tindaklanjutnya antara lain dengan mempersiapkan prasarana dan sarana lebih lengkap lagi serta dengan program jamban keluarga.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

8) **PERSENTASE PENYELESAIAN FASILITASI PERTANAHAN**

Penyelesaian fasilitas pertanahan adalah program penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dihitung dengan membagi jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan teratasi dibagi jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan dikalikan 100%.

Realisasi persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan teratasi	8	39	8	18	8	0
2	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan	8	39	8	18	8	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui mulai tahun 2020 sampai dengan triwulan I tahun 2025 capaian indikator program persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dapat terealisasi 100%. Faktor pendorong

capaian indikator ini adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian fasilitasi pertanahan untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan, sedangkan penghambat ataupun kendala terkait capaian indikator ini diantaranya:

1. Ketidaksesuaian peruntukkan tanah
2. Surat administrasi tanah tidak lengkap.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

9) PERSENTASE DOKUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan Dokumen yang memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Formulasi yang digunakan pada indikator tersebut di atas adalah jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dibagi jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%.

Tabel 2.16
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2021-2025

Uraian	Capaian sampai dengan				
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	3	0
Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1	1	1	3	1
Persentase (%)	100	100	100	100	0

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung telah menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054 sebagai upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai tahun 2024 s.d tahun 2054 di Kabupaten Temanggung. Saat ini Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054 sudah disahkan dengan Nomor Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024. Sedangkan untuk capaian pada awal tahun 2025 masih 0% hal ini disebabkan karena data pendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) belum update sehingga masih dalam tahap proses pengumpulan data dan proses penyusunan.

10) PERSENTASE PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Amdal. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL UPL. Sebelum terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 Izin Lingkungan yang dikeluarkan merupakan persetujuan rekomendasi sedangkan setelah terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 persetujuan lingkungan yang dikeluarkan adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan persetujuan.

Dasar Hukum indikator program di atas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikali dengan 100%. Capaian indikator program dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	Na	0	1	3	9	3
2	Jumlah Usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	Na	0	1	3	9	3
3	Persentase	Na	0	100	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas diketahui capaian indikator mulai tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2025 tercapai 100%. Faktor pendorong capaian tersebut pada tahun 2025 antara lain telah diterbitkannya :

1. Persetujuan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung
2. PKPLH Kegiatan Perbaikan Dinding Penahan Tebing (DPT) dan Groundsill Sungai Galeh Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
3. Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kedu.

Faktor penghambat dari capaian indikator ini antara lain adanya aplikasi baru berupa sistem Amdalnet yang masih dalam proses pengintegrasian dan penerapan aplikasi terhadap sistem OSS sehingga menjadi faktor penghambat dalam pelayanan. Sedangkan upaya tindaklanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan KLHK dan DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

11)INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada

lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam

Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemaran ringan

$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemaran sedang

$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemaran berat

Tabel 2.18
Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63	59,63

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 nilai IKA masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sebesar 59,63 hal ini disebabkan karena jadwal pengujian kualitas air belum dilaksanakan pada awal tahun 2025. Faktor Pendorong lainnya Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan. Upaya untuk mencapai target antara lain dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

12)INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar

Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- h. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- i. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota:
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- j. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- k. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- l. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- m. $I_{eu} = 50\% \text{IndeksNO}_2 + 50\% \text{IndeksSO}_2$,
- n. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84	87,84

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai IKU dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024, hal ini disebabkan karena belum ada jadwal pengujian kualitas udara ambien dari Kementerian LHK. Faktor pendorong antara lain dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan.

13) PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS TERTANGANI TERHADAP TOTAL LUAS LAHAN KRITIS

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem

yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,
3. Kebakaran hutan,

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi

tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.20
Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50	-	-	-	2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70	-	-	4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35	-	-	4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11	-	-	-	3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21	-	-	2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04	-	-	-	2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64	-	-	2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11	-	-	2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06	-	573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45	-	411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66	-	523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58		-	372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41		722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83	-	-	696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36	-	-	620.94	3,769.24
16	Kranggan	-	-	2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat	-	13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36	-	-	-	980.15	3,324.84
19	Tretep	-	-	2,800.32	828.99	-	93.90	3,723.21
20	Wonoboyo	-	-	4,008.03	-	-	256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52
Sumber: Inventarisasi Kekritisian Lahan TA 2017 Kab. Temanggung								

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar

8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha.

Untuk mengetahui capaian proporsi luasan lahan kritis di Kabupaten Temanggung yang diupayakan penanganannya digunakan formulasi perhitungan luas lahan kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Tabel 2.21
Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,17	0,10	1,75	2,46	3,09	3,27
Luas Lahan Kritis yang diupayakan Penanganannya	Ha	12,89	12,89	180,275	253,063	317,708	334,41
Luas Lahan Kritis	Ha	Na	7.566,5	7.566,5	10.280,46	10280,46	10223,96

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan upaya penanganan lahan kritis seluas 334.41 Ha hal ini terlaksana karena adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, KLHK, OPD terkait, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat dan organisasi relawan yang berpartisipasi dalam Gerakan Penanaman. Selain itu musim hujan yang datang lebih awal sehingga memungkinkan dilakukannya penanaman lebih awal. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain diperlukan dana/anggaran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan penanganan lahan kritis serta penyesuaian jadwal

penanaman yang tepat. Upaya tindak lanjut terkait indikator di atas antara lain:

1. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintahan, maupun masyarakat umum
2. Identifikasi masalah untuk penentuan tematik penanaman
3. Melakukan inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya
4. Melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya
5. Perawatan bibit yang lebih intensif, sehingga bibit siap disistribusikan ketika dibutuhkan oleh masyarakat.

14) PERSENTASE LUAS RTH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG TERTANGANI

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dengan target capaian adalah Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani. Sebagai Landasan Hukum menggunakan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Formulasi perhitungan Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani menggunakan rumus luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani dibagi dengan luas RTH Milik Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani maupun luas RTH Milik Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tahun 2020-2025

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025
Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	92,02	73,61
Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani (M ²)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.352,21	79.901,75
Luas RTH Milik Pemerintah Daerah (M ²)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	86.232,21	108.550,21

Capaian indikator tersebut di atas mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena luasan RTH milik pemerintah daerah bertambah menjadi 108.550,21 M2 sedangkan penanganan RTH milik Pemerintah Daerah belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Penambahan RTH diantaranya Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan dan Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Pemeliharaan rutin tahun ini tidak dapat dilaksanakan maksimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana dalam pemeliharaan RTH
2. Jumlah SDM yang terbatas

3. Hutan kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya.

Untuk rekomendasi dan tindak lanjut dari indikator persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani antara lain dengan pengelolaan RTH Publik yang sudah ada. Data Taman Kota di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

15) PERSENTASE USAHA YANG MEMILIKI RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib membuat rincian teknis limbah B3 sehingga dapat diketahui persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, dengan formulasi perhitungan menggunakan jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%. Sebagai landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

- a) Peraturan Menteri Lingkungann Hidup dan Kehutanan Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH.

Capaian indikator persentase usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3 dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Persentase Usaha yang Memiliki
Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025
Persentase kajian teknis penyimpanan limbah B3	Na	100	100	100	100	100
Jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3	Na	0	1	10	10	6
Jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan	Na	0	1	10	10	6

Berdasarkan tabel capaian tahun 2020 tidak diketahui sedangkan capaian mulai tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2025 tercapai 100%. Faktor capaian indikator ini antara lain adanya regulasi yang mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis atau standar tempat penyimpanan limbah B3 sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaku kegiatan dan/atau usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PerMen LHK beserta turunannya. Upaya tindaklanjutnya antara lain Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan untuk membuat rincian teknis atau standar teknis penyimpanan limbah B3.

16) PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA/KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan

hidup merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup:

$$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan}}{\text{Target Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan}} \times 100 \%$$

Tabel 2.24
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

No	Tahun	Capaian				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	50	50	10
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	50	50	50
3	Capaian (%)	100	100	100	100	20,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian indikator mulai tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2025. Capaian tahun 2025 belum sesuai target yang telah ditetapkan karena belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung. Sedangkan faktor pendorongnya antara lain :

1. Adanya tim Pembinaan dan Peengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung
2. Adanya pengumpulan data secara online untuk pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

Sebagai upaya tindaklanjut dalam mencapai target indikator di atas:

1. Melakukan permintaan data Update terkait pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya pengawasan secara tidak langsung.
2. Membuat daftar target prioritas untuk pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung.

17)CAKUPAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal

65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Sebagai Dasar Hukumnya adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Formulasi perhitungan jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi total sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikali 100%. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Sekolah Adiwiyata	193	205	209	209	217	217
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	750	750	750	750	750
Persentase (%)	26,48	27,33	27,87	27,87	28,93	28,93

Capaian sampai triwulan I tahun 2025 masih sama dengan kondisi tahun 2024 yaitu sebesar 28,93%, karena pada awal tahun 2025 calon sekolah-sekolah Adiwiyata Kabupaten masih dalam masa pembinaan dan belum dilakukan penilaian. Faktor pendorong capaian indikator ini diantaranya sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Faktor penghambat antara lain rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata sehingga dalam upaya meningkatkan capaian indikator ini dengan mendorong dan memaksimalkan potensi sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. Selain itu juga melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

18)PERSENTASE PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/ Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklim (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim.

Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	-	14	11	16	25	0
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	-	17	13	9	15	2
Persentase (%)	-	82,35	84,62	178	166,67	0

Keterangan:

Jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup yang diusulkan tiap tahun berbeda-beda.

Formulasi perhitungan yang di gunakan yaitu dengan

rumus berikut:

Rumus Perhitungannya :

$$\text{Presentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup} = \frac{\sum \text{Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diperoleh}}{\sum \text{Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas pada awal tahun 2025 belum ada penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperoleh dari 2 (dua) usulan penghargaan yang diusulkan. Hal ini dikarenakan beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional masih dalam proses pengusulan dan/atau masih menunggu pengumuman pengusulan. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup antara lain:

1. informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun
2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan setiap tahun.

Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup
3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan.

19) PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%.

Tabel 2.27
Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	7	12	14	12	11	3
Jumlah pengaduan yang masuk	7	12	14	12	11	3
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif. Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain adanya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang ada. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

20) PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung

berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

- a. Pengurangan Sampah (waste minimization) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. Penanganan sampah (waste handling) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta

kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau container sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang diskumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan terdiri dari :

1. Pengurangan sampah

Pengurangan yang tercatat yaitu hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan bank sampah.

2. Penanganan sampah

- a. Persentase sampah tertangani di Sumber

yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

b. Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), dan pengelolaan lindi.

c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan. Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

Rumus Persentase sampah tertangani adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

3. Persentase Pengoperasian TPA

Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penanganan gas metan

Timbulan sampah terkelola di Kabupaten Temanggung pada triwulan I tahun 2025 sebesar 60,75%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sampah terkelola sebesar 22.495,58 ton dari jumlah timbulan sampah sebesar 37.030 ton.

Tabel 2.28
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (Ton)	44.003,97	58.419,03	86.263,87	90.276,62	93204,56	22.495,58
Jumlah Timbulan Sampah (Ton)	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358	148.153	37.030
Persentase (%)	24,23	32,00	59,06	61,26	62,91	60,75

Berdasarkan tabel di atas capaian dari tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena terdapat penambahan cakupan pelayanan serta meningkatnya pengelolaan sampah di tingkat desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang harus dihadapi antara lain :

1. belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah dan terdata
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah (TPS3R, TPSD, bank Sampah)
3. Budaya buang sampah sembarang masih ada di masyarakat.

Dalam menghadapi hambatan tersebut diperlukan upaya tindak lanjut dalam penyelesaian masalah agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya tersebut antara lain sosialisasi pengelolaan sampah tingkat desa serta dengan koordinasi dan pendampingan pengelolaan sampah.

21)CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus perhitungan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.29
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2020-2025

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	289
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	131	155	177	198	215	220
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	45,33	53,63	61,24	68,51	74,39	76,12

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator cakupan pelayanan persampahan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami peningkatan, hal

ini disebabkan karena terdapat penambahan cakupan pelayanan serta meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang dihadapi antara lain belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah serta terbatasnya armada dan SDM pengangkut sampah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menghimbau pengelola sampah desa agar melakukan pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri serta koordinasi dengan Pemerintah Desa.

22)TERSEDIANYA FASILITAS SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN YANG MEMADAI

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa menggunakan barang-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah. Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil pick up, dump truck, arm roll truck. Fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
Daftar Depo Transfer Tahun 2025

No	Nama Barang	Ukuran Bangunan	Luas Tanah	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1	Depo Transfer Parakan Kauman	7 m x 7 m	21 m x 10 m	1 unit	Parakan Kauman	Bangunan Permanen
2	Depo Transfer Seklontong	2 m x 4 m	7 m x 10 m	1 Unit	Temanggung II	Semi Permanen
3	Depo Transfer Banyuurip	4 m x 5 m	7 m x 10 m	1 Unit	Banyuurip	Bangunan Permanen
4	Depo Transfer Jampirejo	2 m x 4 m	7 m x 5 m	1 Unit	Jampirejo	Semi Permanen

Tabel 2.31
Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/ PENGELOLA
1	TPS3R Kebonsari	Temanggung	APBN	2012	Kembangasri
2	TPS3R Madureso	Temanggung	APBN	2015	Madu Asri
3	TPS3R Nguwet	Kranggan	APBN	2015	Usaha Mandiri
4	TPS3R Morobongo	Jumo	APBD	2015	Indah Lestari
5	TPS3R Parakan Kauman	Parakan	APBD	2016	Parakan Kauman
6	TPS3R Muntung	Candiroto	APBD	2017	Saras Sejahtera
7	TPS3R Selopampang	Selopampang	APBN	2018	Seloyudho Makmur
8	TPS3R Menggoro	Tembarak	APBN	2018	Goro Makmur
9	TPS3R Kedu	Kedu	APBN	2018	Kedu Gumilar
10	TPS3R Kledung	Kledung	APBN	2018	Kledung Sido Asri
11	TPS3R Gondosuli	Bulu	DAK	2019	Resik Makmur
12	TPS3R Kundensari	Kedu	DAK	2019	Kebon Agung
13	TPS3R Mudal	Temanggung	APBD	2019	Desa Mudal
14	TPS3R Mondoretno	Bulu	APBD PROV	2020	Almond
15	TPS3R Jlegong	Bejen	APBN	2020	Jlegong Lestari
16	TPS 3R Traji	Parakan	DAK	2021	Madani
17	TPS 3R Sriwungu	Tlogomulyo	APBN	2021	Sriwungu Asri
18	TPS 3R Purbosari	Ngadirejo	APBN	2021	Purbo Asri
19	TPS 3R Balesari	Bansari	APBN	2021	Sehati
20	TPS 3R Walitelon Utara	Temanggung	KOTAKU	2021	Besus
21	TPS 3R Parakan Kauman	Parakan	KOTAKU	2021	Parakan Kauman
22	TPS 3R Parakan Wetan	Parakan	KOTAKU	2021	Bambu Runcing
23	TPS 3R Pandemulyo	Bulu	APBN	2022	Pandemulyo Barokah
24	TPS 3R Losari	Tlogomulyo	APBN	2022	Bersih Bersinar
25	TPS 3R Kranggan	Kranggan	DAK	2022	Sinar Progo
26	TPS 3R Keblukan	Kaloran	DAK	2022	Ngrumat Resik
27	TPS 3R Bandunggede	Kedu	DAK	2022	Manunggal Ngudi Resik
28	TPS 3R Mangunsari	Ngadirejo	DAK	2022	Sumber Arum
29	TPS 3R Kedungumpul	Kandangan	APBN	2023	Bumi Rejo
30	TPS 3R Getas	Kaloran	APBN	2023	Sumber Berkah
31	TPS 3R Mandisari	Parakan	DAK	2023	Laksita Sekar Mandiri
32	TPS 3R Joho	Temanggung	DAK	2023	Joho Resik Sejahtera
33	TPS 3R Danurejo	Kedu	DAK	2023	Danurejo Sumber Karya Manunggal
34	TPS 3R Ngaditirto	Selopampang	DAK	2023	Bhumi Tirta Abadi
35	TPS 3R Gambasan	Selopampang	DAK	2023	Bhakti Bhumi Sembawang
36	TPS 3R Pare	Kranggan	DAK	2023	Abdi Manunggal Karya
37	TPS 3R Kaloran	Kaloran	DAK	2023	Berkah Resikan Kaloran
38	TPS 3R Petirejo	Ngadirejo	DAK	2023	Bersih Jaya Mandiri
39	TPS 3R Bansari	Bansari	APBN	2024	Bansari Sehat
40	TPS 3R Mojosari	Bansari	APBN	2024	Srikandi
41	TPS 3R Purborejo	Bansari	APBN	2024	Purborejo Maju
42	TPS 3R Tanurejo	Bansari	APBN	2024	Berkah Mandiri
43	TPS 3R Giripurno	Ngadirejo	APBN	2024	Giri Indah
44	TPS 3R Tuksari	Kledung	APBN	2024	Tirta Panca Manunggal

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/ PENGELOLA
45	TPS 3R Karangtejo	Kedu	APBN	2024	Karangtejo Asri
46	TPS 3R Kupon	Pringsurat	APBN	2024	Sumber Raharjo

Tabel 2.32
Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Alat Berat	7	7	7	7	7	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	17	17	17	17	17	17	Unit	8 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	7	11	11	11	11	11	Unit	Baik, (3 Milik Dindagkop, 4 pengadaan 2021)
4	Pick Up	9	9	9	9	9	9	Unit	4 Rusak Berat
5	Sepeda Motor	2	2	2	2	2	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	29	34	34	34	34	34	Unit	7 Rusak Berat
	o Roda 3 Kecamatan Temanggung (DPRKPLH)	14	18	18	18	18	18		
	o Roda 3 TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/ TPA	6	7	7	7	7	7		
	o Roda 3 Cadangan	8	4	1	1	1	1		
	o Roda 3 Rusak Berat	1	5	7	7	7	7		
7	Gerobak Sampah	59	59	59	59	59	59	Unit	6 unit layak operasi 53 rusak
	a. Gerobak Sampah TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	10	10	10	10	10	10		
	b. Gerobak Sampah Cadangan	4	4	4	4	4	4		
	c. Gerobak Sampah Temanggung	29	29	29	29	29	29		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Kranggan 3, Bulu 2, Kedu 1, Jumo 1 dan Tembarak 1)	8	8	8	8	8	8		
	e. Gerobak Sampah Rusak Berat	n/a	8	8	8	8	8		
8	Kontainer Sampah	28	28	33	32	32	32	Buah	
	a. Kontainer TPS 3R	5	5	6	6	6	6		
	b. Kontainer Armroll	4	4	7	7	7	7		
	c. Kontainer Depo Transfer	5	5	4	4	4	4		
	d. Kontainer Lainnya	6	6	9	9	9	9		
	e. Kontainer Rusak Berat	1	1	1					
	f. Kontainer Pasar	7	7	7	7	7	7		Milik Dinperindagkop
9	Tangki IPLT	2	2	2				Unit	Baik

Tabel 2.33
Daftar Alat Pengolah Sampah
di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset						Kondisi
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Excavator	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Rusak Berat
2	Buldozer	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Baik
3	Mesin Pencacah (Kompos/Organik)	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rusak Ringan
4	Mesin Pirolisis	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
5	Mesin Pencacah An Organik /Plastik	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak Berat
6	Mesin Press Plastik	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
7	Jembatan Timbang	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak/dalam perbaikan

2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdapat indikator yang sudah mencapai target namun pada sisi yang lain masih ada indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan upaya keras, selain itu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dari 25 indikator (1 indikator sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama dan 21 indikator program terdapat 3 indikator dengan status capaian Sangat Rendah yaitu sebagai berikut:

a. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hal ini disebabkan karena Dokumen IKPLHD Tahun 2025 dalam proses pengumpulan data dan proses penyusunan

b. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Hal ini disebabkan karena pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

c. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup

Hal ini disebabkan karena informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun serta ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan setiap tahun.

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPRKPLH antara lain:

- Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung
- Terdapat backlog perumahan
- Belum adanya acuan pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh
- Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung
- Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian tanah obyek reforma agraria (TORA)
- Rendahnya akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Temanggung
- Belum optimalnya pendampingan peningkatan PSU perdesaan dan perkotaan
- Belum adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penunjang kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (ASN, Non ASN, TFL, KSM, Perangkat Desa, dll)
- Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi) dan Perumahan Rakyat
- Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman
- Kemudahan investasi

- Pengelolaan RTH Perkotaan
 - Indeks kualitas lingkungan hidup
 - Luasan lahan kritis
 - Emisi gas rumah kaca (GRK)
 - Pelestarian sumber mata air
 - Pengelolaan sampah yang belum optimal
 - Kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan persampahan
 - Rendahnya tingkat pengurangan sampah dari sumbernya
 - Pelayanan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa yang belum optimal
 - Belum optimalnya tata kelola Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemda
 - Kelayakan Infrastruktur prasarana, sarana, dan utilitas umum Rusunawa
 - Di Kabupaten Temanggung belum ada Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi
 - Capaian sanitasi aman yang masih jauh dari target
 - Belum tersedianya temporary landfill pada saat pembangunan TPST
 - Belum tersedianya tenaga operasional terlatih pada TPST
 - Belum optimalnya operasional pengelolaan sampah residu di TPST.
3. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung. Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel. 2.34
Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1. Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan 2. Belum meratanya penyediaan perumahan 3. Belum tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara optimal 4. Akses sanitasi aman masih rendah 5. Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal 6. Luasan ruang terbuka hijau permukiman terbatas 7. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana yang tangguh pada kawasan permukiman	Peningkatan Layanan Akses Dasar dan Sanitasi	1. Peningkatan akses air baku yang aman dan adil untuk semua 2. Peningkatan akses dan kualitas sanitasi yang memadai untuk semua 3. Infrastruktur persampahan belum optimal	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Temanggung berada di bagian hulu Jawa Tengah, sehingga mempunyai posisi penting dalam menjaga konservasi dan keseimbangan sumber daya alam. Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap sumber daya air yaitu terdapat hampir seribu mata air	1. Kualitas Lingkungan di Kabupaten Temanggung menurun, khususnya pada kualitas lahan 2. Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis 3. Masih rendahnya akses sanitasi aman yang berkelanjutan 4. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup ramah lingkungan 6. Pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung belum optimal 7. Kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan masih belum optimal	Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Risiko Bencana	Pelestarian dan perlindungan sumber daya alam Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Krisis Lingkungan: Tiga Krisis Lingkungan (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan	Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	Keberlanjutan Lingkungan Hidup Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan pada hasil penetapan Renja Tahun 2025 terhadap Rancangan Awal Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi yang menangani urusan tata ruang.
2. Terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - e. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - g. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPД per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.35
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			38.465.529.424	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.464.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	Persentase jumlah TPS 3R	17.30 %	-	-
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS 3R yang dibangun/ dipelihara	10 Unit	-	
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0 Ton/hari	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	
	-	-	-	-	-

HASIL PENETAPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			38.465.529.424	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.464.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	Persentase jumlah TPS 3R	17.30 %	-	-
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS 3R yang dibangun/ dipelihara	10 Unit	-	
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0 Ton/hari	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	
	-	-	-	-	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	500 Unit	-	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	- M ³ /H ari	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.464.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			330.000.000	
	[Meningkatkan Hunian Layak]	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 %	330.000.000	-
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100 Unit	30.000.000	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dilakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Unit	300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	500 Unit	-	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	- M ³ /Ha ri	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.464.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			330.000.000	
	[Meningkatkan Hunian Layak]	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	330.000.000	-
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100 Unit	30.000.000	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dilakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Unit	300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
		0 0 0	300.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Kertosari Kab. Temanggung , Kranggan, Kranggan Kab. Temanggung , Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Wetan Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2.134.000.000	
	[Meningkatkan Kawasan Permukiman]	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	48.81 69.06 80.03 96.43	2.134.000.000	-
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit	2.134.000.000	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
		0 0 0	2.134.000.000	Kab. Temanggung , Kedu, Semua Kel/Desa	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.001.529.424	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.04.02.2.05.000 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
		0	0 0	300.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2.134.000.000	
	[Meningkatnya Kawasan Permukiman]	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	48.81 69.06 80.03 96.43	2.134.000.000	-
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit	2.134.000.000	
1.04.03.2.03.000 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
		0	0 0	2.134.000.000	Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.001.529.424	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			36.001.529.424	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.583.261.174	
	-	-	-	13.583.261.174	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	12 Lapor an	12.436.291.184	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang /bula n	12.436.291.184	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perkantoran	12 Lapor an	96.000.000	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapor an	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			36.001.529.424	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.583.261.174	
	-	-	-	13.583.261.174	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	12 Lapora n	12.436.291.184	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang /bulan	12.436.291.184	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perkantoran	12 Lapora n	96.000.000	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora n	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	30.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	2 Paket	40.000.000	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	15.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Lapor an	840.969.990	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapor an	1.500.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapor an	105.000.000	Kab. Temanggung , Sidorejo Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapor an	734.469.990	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	3 Paket	170.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	30.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	2 Paket	40.000.000	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	15.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Lapora n	840.969.990	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapora n	1.500.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	105.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	734.469.990	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	3 Paket	170.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pemerintahan Daerah				
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	90.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	10.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			45.000.000	
	[Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup]	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	45.000.000	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 Doku men	45.000.000	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Doku men	45.000.000	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			220.000.000	
	[Meningkatnya Pengendalian	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Lahan kritis tertangani	15.7 23.3	220.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pemerintahan Daerah				
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	90.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	10.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			45.000.000	
	[Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup]	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	45.000.000	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 Doku men	45.000.000	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Doku men	45.000.000	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			220.000.000	
	[Meningkatnya Pengendalian	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Lahan kritis tertangani	15.7 23.3	220.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	4 60.03 7.40		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.54 angka	130.000.000	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Doku men	30.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25 Doku men	100.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi				
		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	Kab. Temanggung , Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung , Tlogomulyo, Semua Kel/Desa
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			15.230.000.000	
	[Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	80	15.230.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	4 60.03 7.40		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.54 angka	130.000.000	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Doku men	30.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25 Doku men	100.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi				
		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			15.230.000.000	
	[Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	80	15.230.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			10.000.000	
	[Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	10.000.000	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	50 usaha /keg iatan	10.000.000	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Bada n Usah a	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan,

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			10.000.000	
	[Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	10.000.000	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	50 usaha /keg iatan	10.000.000	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Badan Usaha	10.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
					Semua Kel/Desa
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			20.000.000	
	[Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30.93	20.000.000	-
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup disekolah	5 Sekol ah	20.000.000	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lemb aga	20.000.000	-
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			10.000.000	
	[Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	10.000.000	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	15 Pengh argaa n	10.000.000	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entita s	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
					Semua Kel/Desa
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			20.000.000	
	[Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30.93	20.000.000	-
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup disekolah	5 Sekola h	20.000.000	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lemba ga	20.000.000	-
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			10.000.000	
	[Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	10.000.000	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	15 Pengha rgaan	10.000.000	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	10.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10.000.000	
	[Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup]	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	10.000.000	-
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	10.000.000	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			6.873.268.250	
	[Meningkatkan Pengelolaan Persampahan]	Cakupan Layanan Persampahan Persentase sampah yang terkelola Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34.14 64.07 77.85	6.873.268.250	-
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	9621 7,5 Ton	6.873.268.250	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	400.000.000	-
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	5121 7,5 Ton	1.398.268.250	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10.000.000	
	[Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup]	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	10.000.000	-
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	10.000.000	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	10.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			6.873.268.250	
	[Meningkatkan Pengelolaan Persampahan]	Cakupan Layanan Persampahan Persentase sampah yang terkelola Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34.14 64.07 77.85	6.873.268.250	-
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	96217, 5 Ton	6.873.268.250	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	400.000.000	-
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	51217, 5 Ton	1.398.268.250	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
		0	4500 0 0	5.075.000.000	Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan
J U M L A H				38.465.529.424	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
		0	45000 0	5.075.000.000	Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan
J U M L A H				38.465.529.424	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.36
Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ BESARAN	CATATAN
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10				
	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kedu	Jumlah tidak layak huni yang diperbaiki	34 Unit	
	b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kranggan	Jumlah tidak layak huni yang diperbaiki	29 Unit	
	c. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kaloran	Jumlah tidak layak huni yang diperbaiki	32 Unit	

2.4. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2025

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Dukungan				
1	Integrasi Kawasan Kumuh Melalui “Doktor Pekape” untuk Memenuhi Kebutuhan Kawasan Permukiman yang Layak Huni di Kabupaten Temanggung	DPRKPLH, Kecamatan, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD dan DAK Bidang Sanitasi	Penentuan kondisi awal kawasan kumuh selanjutnya penyusunan profil kawasan kumuh Kabupaten Temanggung, peta kawasan kumuh selanjutnya Penetapan Kawasan Kumuh di Kabupaten Temanggung	Pembangunan SPALDS	Berkurangnya kawasan kumuh	DPRKPLH 2024

2.5. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan skala provinsi dan nasional yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2025

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2025		
2	2024	1. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 1 Kandangan 2. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 2 Temanggung 3. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMA N 1 Parakan 4. Sekolah Adiwiyata Nasional: SD Muhammadiyah Parakan 5. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Giyono, Kec. Jumo 6. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Gilingsari, Kec. Temanggung 7. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Pratama: Desa Jumo, Kec. Jumo 8. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Madya Tingkat Provinsi: Desa Balesari Kecamatan Bansari 9. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Desa Jumo Kecamatan Jumo 10. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung 11. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 5 Temanggung 12. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 1 Tembarak 13. Sekolah Adiwiyata Provinsi MTs N 2 Temanggung 14. Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MPP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) (MPA Abdi Bumi Desa Batusari Kec. Kledung) 15. Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup atas nama Sukoyo (Dsn. Krecek Ds. Getas Kec. Kaloran) 16. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup Kelompok Pecinta Alam (KPA) Azora Desa Batusari Kec. Kledung 17. Inovasi Proklm (Kategori Video Inovasi ProKlim Terbaik 1 (Desa Gununggempol Kec. Jumo))	
3	2023	1. Penghargaan Nirwasita Tantra	

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		2. Terbaik I Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional, atas nama R. Gravita Eka Purnama 3. Pemenang pertama Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi, atas nama R. Gravita Eka Purnama 4. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional. 5. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Provinsi 6. Juara harapan IV Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo 7. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SMP Negeri 1 Kaloran 8. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Jumo 9. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SD Muhammadiyah Parakan 10. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak 11. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 : SMP N 6 Temanggung 12. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 : SD N 3 Tuksongo 13. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Ketitang Kecamatan Jumo 14. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Batusari, Kecamatan Kledung 15. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya: Desa Petarangan, Kecamatan Kledung 16. Penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup atas nama Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran, Kecamatan Tembarak.	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 **“Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi”**. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, pelaksanaan pembangunan akan diwujudkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Penataan garis imajiner, dengan program aksi:
 - a. Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprpto, Jl M.T. Haryono
 - b. Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman
 - c. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun
 - d. Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala
 - e. Revitalisasi Taman Kartini
 - f. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala
 - g. Pembangunan citywalk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)
 - h. Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)

- i. Revitalisasi Pasar Kliwon
2. Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
 - b. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
 - c. Penerapan merit system dan talent pool
 - d. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
 - e. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
 - f. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)
 - g. Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW
 - h. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola kelurahan)
3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, dengan program aksi:
 - a. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
 - b. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
 - c. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
 - d. Regenerasi petani
 - e. Penyediaan bibit ternak dan ikan
 - f. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan
 - g. Pembangunan greenhouse
4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan, dengan program aksi:
 - a. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
 - b. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
 - d. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik

- e. Penyediaan air bersih dan sanitasi
- f. Penyediaan rumah layak huni
- 5. Optimalisasi pasar daerah, dengan program aksi:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
 - b. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
- 6. Penguatan dan pelestarian seni budaya, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan dewan kesenian
 - b. Pertemuan pegiat seni dan budaya
 - c. Penghargaan pada seniman dan budayawan
 - d. Pentas seni di ruang publik
 - e. Pelaku seni dan budaya lokal go to school
 - f. Pemakaian baju adat khas Temanggung
 - g. Festival seni dan budaya tahunan Temanggung
 - h. Informasi dan promosi pariwisata
 - i. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
 - j. Rebranding Temanggung
- 7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan Satgas PPA
 - b. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
 - c. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
 - d. Pemberdayaan ekonomi perempuan
 - e. Penyediaan hotline/panic button
- 8. Pelayanan dasar bidang pendidikan, dengan program aksi:
 - a. Akses pendidikan untuk semua warga
 - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
 - c. Pimpinan daerah sambang sekolah
 - d. Penguatan database pendidikan
 - e. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
 - f. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
 - g. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
 - h. Pemberdayaaan PAUD
 - i. insentif kepada Guru Keagamaan

- j. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
 - k. Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah
9. Pelayanan dasar bidang kesehatan, dengan program aksi:
 - a. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
 - b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)
 - c. Pemeriksaan kesehatan gratis
 - d. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
 - e. Peningkatan kualitas layanan RSUD
 - f. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak
 - g. Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo
 10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan, dengan program aksi:
 - a. Penataan data program perlindungan sosial
 - b. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
 - c. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal
 - d. Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
 11. Pelayanan perijinan dan administrasi, dengan program aksi:
 - Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik
 12. Integrasi data, dengan program aksi:
 - a. Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar PD
 - b. Sinkronisasi dan integrasi data
 13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam, dengan program aksi:
 - a. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
 - b. Pembentukan desa tangguh bencana
 - c. Peningkatan kapasitas relawan bencana
 - d. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
 - e. Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
 - f. Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
 - g. Penyediaan early warning system

- h. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
- 14. Digitalisasi dan smart city, dengan program aksi:
 - a. Digitalisasi dan integrasi layanan digital
 - b. Lapor Bupati
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM
 - d. Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa
 - e. Pembuatan superapps mobile
 - f. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan
 - g. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis
- 15. Pelestarian lingkungan hidup, dengan program aksi:
 - a. Perlindungan sumber mata air
 - b. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
 - c. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
 - d. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
 - e. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
 - f. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
 - g. Aksi bersih lingkungan
 - h. Penghijauan di lokasi lahan kritis
 - i. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
 - j. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
- 16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi, dengan program aksi:
 - a. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
 - b. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
 - c. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala

- d. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi - BUMD Sehat
- 17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah, dengan program aksi:
 - a. Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan ormas
- 18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga, dengan program aksi:
 - a. Pemajuan cabang olahraga unggulan
 - b. kesejahteraan dan profesionalitas atlet
 - c. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara professional
- 19. Peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan program aksi:
 - a. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
 - b. Peningkatan hubungan industri

Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan Tupoksi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026	Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Indikator Sasaran	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah
Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Pembangunan rumah	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman
Kedaulatan Pangan dan Energi	Pengelolaan sampah yang terpadu	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka Tujuan dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2025 adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman serta Ketahanan terhadap Perubahan Iklim

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2026 ini sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim
2. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan pada tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu dan meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026

VISI	:	TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)
MISI	:	MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEJAHTERA, PARTISIPATIF, SETARA, BERWAWASAN LINGKUNGAN, MUDAH MENGAKSES LAYANAN PUBLIK DAN ADANYA RASA AMAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
					TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2029	KETERANGAN
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKUPD)					
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	74,27	74,57	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,01	85,04	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	79	80,5	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	75	76,5	
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TON CO2 EQ	1.129.065,77	2.135.079,11	
		Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	72,47	74,78	
		INDIKATOR PROGRAM					
		Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
					TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2029	KETERANGAN
		Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,43	96,6	
			Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,81	48,84	
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	69,06	75,6	
			Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,03	80,35	
		Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100	
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	13,06	28,06	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,3	18,34	
		Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,03	60,06	
			Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4	4,75	
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,4	8,33	
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	23,3	30,2	
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7	17,6	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
					TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2029	KETERANGAN
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	80	95	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	
		Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,93	32,93	
		Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	
		Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	%	34,14	40	
			Persentase sampah yang terkelola	%	64,07	65,47	
			Cakupan Pelayanan persampahan	%	77,85	83,04	

Kebijakan dan strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, hal tersebut dalam rangka upaya menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada penyesuaian pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	38.465.529.424
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.464.000.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	0
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.464.000.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	330.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.134.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.134.000.000
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.134.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36.001.529.424
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.001.529.424
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.583.261.174
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.436.291.184
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.436.291.184

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SELISIH (RP)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	38.465.529.424	0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.464.000.000	0
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	0
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	0	0
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	0	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	0
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.464.000.000	0
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	330.000.000	0
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	0
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	0
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000	0
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.134.000.000	0
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.134.000.000	0
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.134.000.000	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36.001.529.424	0
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.001.529.424	0
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.583.261.174	0
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.436.291.184	0
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.436.291.184	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.000.000
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.969.990
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.469.990
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	45.000.000
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	45.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	220.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	130.000.000
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	100.000.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.000.000
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	90.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.230.000.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15.230.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.230.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SELISIH (RP)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.000.000	0
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	0
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	0
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	0
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	0
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	0
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	0
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.969.990	0
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	0
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.469.990	0
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000	0
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	0
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	0
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000	0
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	45.000.000	0
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	45.000.000	0
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	220.000.000	0
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	130.000.000	0
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000	0
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	100.000.000	0
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.000.000	0
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	90.000.000	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.230.000.000	0
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15.230.000.000	0
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.230.000.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	20.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.873.268.250
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.873.268.250
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.398.268.250
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.075.000.000
J U M L A H		38.465.529.424

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SELISIH (RP)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.000.000	0
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000	0
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000	0
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	0
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	20.000.000	0
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.000.000	0
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000	0
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	0
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.873.268.250	0
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.873.268.250	0
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	0
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.398.268.250	0
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.075.000.000	0
J U M L A H		38.465.529.424	0

Berdasarkan tabel di atas alokasi anggaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada Rancangan Renja dan RKPD sama yaitu sebesar Rp38.465.529.424.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGLATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						38.465.529.424							37.988.835.552
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.464.000.000							6.530.000.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0							0
37.989	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						0						-	0
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	Persentase jumlah TPS 3R	18.69	15.57	16.96	17.30	0	-	-	-	-	-	-	0
1.03.04 .2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TPA/TPS 3R yang dibangun/ dipelihara	-			10 Unit	0			Melanjutka n pengemb anan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	0
1.03.04 .2.01.0 020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R													
		Kapasitas TPA/TPST/ SPA/TPS3R yang dibangun				0 Ton/hari	0	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK- BIDANG S ANITASI- REGUL ER	Melanjutka n pengemb anan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		0
38.355	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						0						-	0
	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
1.03.05 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	-			500 Unit	0			Melanjutka n pengemb anan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan	Masyarakat	-	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat													
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				- M²/Hari	0	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2.464.000.000							6.530.000.000
37.260	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						330.000.000						-	530.000.000
	[Meningkatnya Hunian Layak]	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baikPersentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	100	100	100	330.000.000	-	-	-	-	-	-	530.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang terdata	-			100 Unit	30.000.000			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat korban bencana/Re lokasi Program Kabupaten	-	30.000.000
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis	Masyarakat korban bencana/Re lokasi Program Kabupaten		30.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dilakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-			6 Unit	300.000.000			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat Penghuni Rusunawa	-	500.000.000
1.04.02.2.05.002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
		0				0 0	300.000.000	Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung , Kranggan, Kranggan Kab. Temanggung , Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung , Temanggung , Kertosari Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat Penghuni Rusunawa		500.000.000
37.625	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						2.134.000.000						-	6.000.000.000
	[Meningkatkan Kawasan Permukiman]	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	48.85 77.78 80.45 96.66	48.80 64.7 79.82 96.31	48.80 66.88 79.93 96.37	48.81 69.06 80.03 96.43	2.134.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-			100 Unit	2.134.000.000			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg	Masyarakat Kabupaten Temanggun g	-	6.000.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										kewirausah aan, mege mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
1.04.03.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
		0				0 0	2.134.000.000	Kab. Temanggung , Kedua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mege mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat Kabupaten Temanggun g		6.000.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.001.529.424							31.458.835.552
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						36.001.529.424							31.458.835.552
36.933	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.583.261.174						-	18.803.835.552
	-	-	-	-	-	-	13.583.261.174	-	-	-	-	-	-	18.803.835.552
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	-			12 Laporan	12.436.291.184			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	ASN DPRKPLH	-	12.622.835.552
2.11.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bula n	12.436.291.184	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi	ASN DPRKPLH		12.622.835.552

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
											birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perkantoran	-			12 Laporan	96.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH	-	126.000.000
2.11.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		7.500.000
2.11.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		24.000.000
2.11.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		22.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administras i Perkantoran DPRKPLH		27.000.000
2.11.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administras i Perkantoran DPRKPLH		45.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	-			2 Paket	40.000.000			Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sarana dan Prasarana DPRKPLH	-	70.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.11.01.2.07.005	Pengadaan Mebel													
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	15.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sarana dan Prasarana DPRKPLH		35.000.000
2.11.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sarana dan Prasarana DPRKPLH		35.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	840.969.990			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH	-	5.613.000.000
2.11.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		3.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Adminstras i Perkantoran DPRKPLH		110.000.000
2.11.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	734.469.990	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Adminstras i Perkantoran DPRKPLH		5.500.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	-			3 Paket	170.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Aset DPRKPLH	-	372.000.000
2.11.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				26 Unit	90.000.000	Kab. Temanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan	Penguatan Landasan Perekonom	Aset DPRKPLH		110.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Temanggung , Sidorejo		lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Aset DPRKPLH		250.000.000
2.11.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				14 Unit	10.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Aset DPRKPLH		12.000.000
37.298	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						45.000.000						-	50.000.000
	[Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup]	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPersentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	100	100	100	45.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	-			1 Dokumen	45.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	50.000.000
2.11.02.2.01.002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	45.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		50.000.000
37.663	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						220.000.000						-	750.000.000
	[Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Lahan kritis tertangani Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	19.6 32.6 5 60.07 8.65	- 46.81 7.08	15.7 20.9 3.75 60.02 7.08	15.7 23.3 4 60.03 7.40	220.000.000	-	-	-	-	-	-	750.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-			75.54 angka	130.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	400.000.000
2.11.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	-			50.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										masyarakat yang adil dan makmur.				
2.11.03.201.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				25 Dokumen	100.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			350.000.000
2.11.03.203	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	-			4 Ha	90.000.000			-	-	-	-	350.000.000
2.11.03.203.009	Pelaksanaan rehabilitasi													
		<i>luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				4 Ha	90.000.000	Kab. Temanggung , Tlogomulyo, Semua Kel/Desa Kab.Temang gung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000
38.028	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						15.230.000.000						-	2.100.000.000
	[Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	100	73.61	74.00	80	15.230.000.000	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000
2.11.04.201	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	-			5.76 Ha	15.230.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	2.100.000.000
2.11.04.201.004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				5.76 Ha	15.230.000.000	Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin	-	Masyarakat		2.100.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
								Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
38.759	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						10.000.000						-	25.000.000
	[Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	100	100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	-			50 usaha/kegiatan	10.000.000			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan dan/atau usaha di	-	25.000.000
2.11.06.2.01.009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				50 Badan Usaha	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan dan/atau usaha		25.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
39.489	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						20.000.000						-	100.000.000
	[Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	33.60	28.93	30.26	30.93	20.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup disekolah	-			5 Sekolah	20.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sekolah	-	100.000.000
2.11.08.2.01.005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
		Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ k omunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	20.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sekolah		100.000.000
39.855	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						10.000.000						-	150.000.000
	[Meningkatkan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	100	100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	-			15 Penghargaa n	10.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	150.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.09.2.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
		<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				3 Entitas	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		150.000.000
40.220	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						10.000.000						-	10.000.000
	[Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup]	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>	-			1	10.000.000			Memperkua t penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	10.000.000
2.11.10.2.01.009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
		<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola</i>				1 Pengaduan	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		10.000.000
40.585	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						6.873.268.250						-	9.470.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
	[Meningkatkan Pengelolaan Persampahan]	Cakupan Layanan Persampahan Persentase sampah yang terkelola Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	45.00 67.27 84.78	32.98 62.91 74.39	33.34 63.27 76.12	34.14 64.07 77.85	6.873.268.250	-	-	-	-	-	-	9.470.000.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	-			96217,5 Ton	6.873.268.250			Memperkua t penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	9.470.000.000
2.11.11.2.01.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				10 Kelompok	400.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		500.000.000
2.11.11.2.01.007	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				51217,5 Ton	1.398.268.250	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		2.970.000.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
		0				45000 0	5.075.000.000	Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		6.000.000.000	
J U M L A H							38.465.529.424								37.988.835.552

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya nanti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan pada Tahun 2026.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.342.475.877 (94,99%) terdiri dari belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi Rp41.092.202.157 (94,96%)
 - a. Belanja Pegawai Rp11.673.529.195 (98,49%)
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp23.058.672.962 (92,52%)

- c. Belanja Hibah Rp200.000.000 (100%)
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp6.160.000.000 (97,86%)
- 2. Belanja Modal Rp250.273.720 (99,14%)
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp250.273.720 (99,14%)

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I sebesar Rp10.534.675.161 (29,43%) terdiri dari belanja sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi Rp10.527.200.161 (31,63%)
 - Belanja Pegawai Rp6.263.324.947 (48,37%)
 - Belanja Barang dan Jasa Rp4.263.875.214 (22,19%)
- 2. Belanja Modal Rp7.475.000 (0,30%)
- 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp7.475.000 (19,96%)

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 DPRKPLH Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran Belanja Program sebesar Rp38.465.529.424 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 2. Program Pengembangan Perumahan
- 3. Program Kawasan Permukiman
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
12. Program Pengelolaan Persampahan.

Temanggung, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung Kodepos 56221 Telepon/Faximili (0293) 4901569
surat elektronik : dprkplh.temanggungkab@gmail.com laman : <https://dprkplh.temanggungkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/75 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
b. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
 - Merumuskan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dipandang perlu akan dilakukan penggantian, dan segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 21 Juli 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

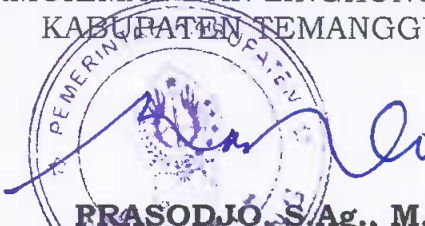
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 - Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPRKPLH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050/75/2025
TANGGAL : 21 JULI 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala DPRKPLH	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris DPRKPLH	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
6.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan	Anggota
8.	Ka. UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Ka. UPT Pengelolaan TPA - IPLT	Anggota
10.	Ka. UPT Rusunawa	Anggota
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Staf Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,


PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013